

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

Uji Sri Dewi Bintu II*, Nur Diana, Arista Fauzi Kartika Sari*****
dewibintoi@gmail.com
Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Sambil mendorong otonomi daerah dan desentralisasi keuangan, pemerintah daerah bebas mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal sebagaimana mestinya. Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Maluku dipengaruhi oleh pemahaman dan penilaian pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja. Strategi kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 47.158, dan nilai F tabel sebesar 2,42. Mengingat $F_{hitung} > F_{tabel}$ sama dengan $47.158 > 2,42$, maka dapat diasumsikan bahwa variabel DAU, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh umum terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah; Dana alokasi umum; Dana alokasi khusus; Belanja daerah; Indeks pembangunan manusia.

ABSTRACT

Local governments are permitted to manage and utilize regional revenue streams in accordance with the wishes of their constituents when regional autonomy and fiscal decentralization are put into place. Knowing and assessing regional original income, general allocation funds, special allocation funds, and expenditures all at once has an impact on the Maluku province Government's Human Development Index. Correlational analysis is used in conjunction with quantitative methodologies in this work. Based on the results of the F test, the calculated F value is 47,158, whereas the F table value in table 3 is 2.42. Since $F_{count} > F_{table}$ equals $47,158 > 2,42$, it may be inferred that the DAU, DAU, DAK, and DBH variables have an overall impact on the Human Development Index.

Keywords: *Locally-generated revenue; General allocation fund; Special allocation fund; Regional shopping; Human development index.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia beralih dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengontrol rumah tangganya dengan sedikit keterlibatan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Desember 1999. Diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 25/25/1999 dan Undang-Undang Nomor Maret 2004 tentang Pemerintah Daerah Perimbangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah ditegakkan dengan Undang-Undang Nomor Maret 2004. Sejak setiap daerah lebih leluasa menggali potensinya dengan otonomi daerah, lebih demokratis dan benar-benar terdesentralisasi (Wertianti, 2013).

Pemerintah daerah bebas mengelola dan menggunakan sumber pendapatan daerah sesuai dengan keinginan masyarakatnya ketika memberlakukan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Setiap daerah harus mampu memenuhi kepentingan ekonomi, kebutuhan pembangunan sosial masyarakat setempat, dan kebutuhan pembangunan daerah serta melaksanakan perbaikan perencanaan sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah. pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013). Pembangunan yang disiapkan dan dilaksanakan oleh suatu daerah dengan menggunakan sumber daya daerah disebut

pembangunan daerah. Karena perkembangan daerah yang pesat, lebih banyak uang harus disisihkan untuk pembangunan, yang meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan yang dimanfaatkan untuk mendanai belanja daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan daerah meliputi uang pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dewan khusus, dan PAD wajib lainnya. Untuk membiayai pembangunan daerah, adalah mungkin untuk mengukur sejauh mana PAD tampaknya bersifat khusus daerah. Pendapatan daerah dari PAD diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan publik dengan memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan penanaman modal. Kehidupan masyarakat dapat meningkat pesat, dan indeks pembangunan manusia dapat meningkat, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Putra & Ulupui, 2015).

Dalam rangka desentralisasi, DAU yang bersumber dari pemerintah pusat merupakan dana yang disisihkan untuk mendukung pembiayaan belanja dan kebutuhan daerah. Ini memerlukan transfer uang dari pemerintah pusat ke daerah dan pemerintah daerah, yang kemudian dapat menggunakannya untuk meningkatkan layanan masyarakat dan meningkatkan standar hidup, mempromosikan gaya hidup sehat, dan memperpanjang harapan hidup (Harahap, 2010). Ada juga DAK yang penting bagi dinamika perluasan infrastruktur daerah dan fasilitas pelayanan dasar, selain DAU. Dalam rangka menciptakan, memperoleh, memelihara, dan memperbaiki infrastruktur dan aset fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk penyediaan aset fisik pembantu, operasi investasi yang menggunakan DAK terutama difokuskan. Inisiatif pembangunan daerah harus mencakup pemanfaatan dan pemanfaatan DAK. Pemerintah daerah akan dibujuk untuk meningkatkan standar pembangunan manusia, yang pada hakekatnya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, berkat pembangunan daerah. Jika DAK ditangani dengan baik, dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan standar pendidikan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur (Putra & Ulupui, 2015).

Pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Utara menjadi fokus penelitian sebelumnya oleh Sa'diyah & Putri (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Aceh Utara. Studi lain oleh Panji & Indrajaya (2016) meneliti bagaimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi kemiskinan dan pembangunan ekonomi di negara bagian Bali. Studi telah mengungkapkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan tidak terlalu dipengaruhi oleh Dana Perimbangan, namun memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan perkotaan di Provinsi Bali. Untuk kepentingan rakyat, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan diperlukan.

Dana pemerintah dan pendapatan daerah merupakan sumber dana tambahan (PAD). Distribusi uang yang sesuai kemudian harus dilakukan. Dengan menggunakan distribusi anggaran belanja sebagai variabel proksi, Setyowati dan Suparwati (2012) menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia (studi empiris negara bagian dan kota di wilayah tengah Jawa). Pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, dan PAD diperhitungkan sebagai variabel independen oleh Setyowati dan Suparwati (2012), bersama dengan indeks pembangunan manusia dan alokasi anggaran. **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku”** adalah judul penelitian ini mengingat hal tersebut.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku ?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku?
3. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku?
5. Apakah Belanja Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
4. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
5. Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.

Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan dari pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Provinsi Maluku.

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dasar modal manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pemberdayaan penduduk untuk pembangunan yang menekankan pada penguatan dasar manusia. Pembangunan diukur dengan faktor-faktor seperti daya beli, kesehatan, dan pencapaian pendidikan. Kemungkinan bahwa tujuan pembangunan akan tercapai meningkat seiring dengan jumlah. Pengembangan adalah prosedur perbaikan (Nur Baeti, 2013). Untuk mencapai tujuan pembangunan, empat komponen pembangunan manusia harus diperhatikan (UNDP, 1995). Empat komponen tersebut yaitu; (1) produktivitas; (2) pemerataan; (3) kesinambungan; dan (4) pemberdayaan.

Belanja Daerah

Priyo (2009:4) mengklaim bahwa membelanjakan uang secara lokal adalah kegiatan berbasis lokal. Besarnya pengeluaran yang merupakan variabel terikat ditentukan oleh sumber dana daerah, pendapatan sendiri, dan pembayaran pemerintah. Oleh karena itu, ada bias pendapatan jika ukuran menunjukkan hubungan negatif antara variabel pendapatan dan variabel pengeluaran. Dengan menyediakan pelayanan dan infrastruktur yang tidak disediakan oleh swasta, belanja daerah sesuai dengan belanja pemerintah daerah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, pemerintah daerah tidak melakukan belanja pemerintah; sebaliknya, itu harus direncanakan.

Dana Alokasi Umum

Dana-Pendapatan-Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan didistribusikan dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan ke seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah pada saat pembagiannya dilakukan. Dana Distribusi Umum akan dialokasikan dari dana APBN sebagai bagian dari pelaksanaan integrasi dengan tujuan untuk menyebarluaskan sumber daya keuangan ke seluruh daerah guna memenuhi kebutuhan daerah. Dana Daerah memberikan pendanaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota (Nordriawan, 2012).

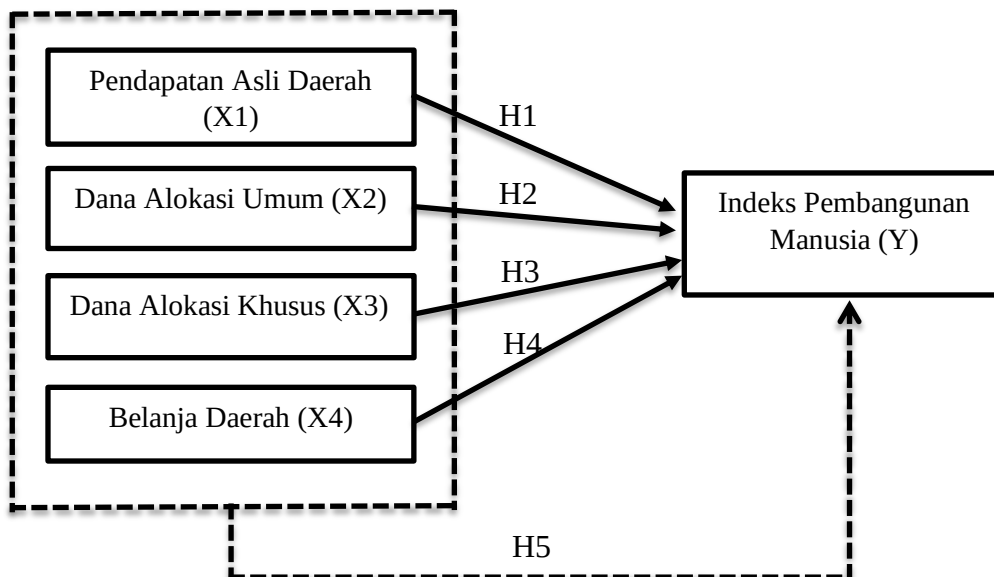
Dana Alokasi Khusus

Rudy Badrudin (2017: 100) menyatakan bahwa “Dana Transfer Khusus adalah dana yang diberikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu kegiatan tertentu, baik fisik maupun non fisik, yang merupakan prakarsa daerah”. Dana alokasi khusus memberikan bantuan keuangan untuk inisiatif khusus di sektor-sektor tertentu yang memiliki kepentingan regional dan nasional, terutama untuk memenuhi biaya infrastruktur dan bangunan umum dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mendorong percepatan pembangunan daerah (Nurlan Darise, 2008 137).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan--Asli--Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam daerah tersebut dan dipungut sesuai dengan kondisi setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan khusus pengelolaan barang milik daerah, dan PAD lainnya secara langsung dimasukkan sebagai sumber PAD dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H1 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Berpengaruh Signifikan Terhadap indeks Pembangunan Manusia
- H1a : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H1b : Dana Alokasi Umum berpengaruh Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H1c : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Signifikan Terhadap indeks pembangunan Manusia

Hid : Belanja Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

METODE PENELITIAN

Metodologi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat mengevaluasi suatu populasi atau sampel dengan tujuan menguji suatu hipotesis (Sugiyono, 2010:13). Menggunakan pendekatan sampling jenuh untuk menentukan sampel. Analisis korelasional digunakan dalam penelitian ini. Studi korelasional, sebagaimana didefinisikan oleh Arikunto (2010: 247), adalah penelitian yang dilakukan untuk memastikan ada tidaknya korelasi antara dua variabel atau lebih.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk penelitian yang dilakukannya. Laporan-Realisasi-APBD dan tabel indeks pembangunan manusia 2016–2021 menjadi bahan penelitian utama kajian tersebut. Dari penentuan sampel ditentukan 11 wilayah, sehingga diperoleh data yang digunakan selama 6 (enam) tahun. Melakukan telaah studi pustaka yang meliputi buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain Pendapatan Asli--Daerah (X1), Dana--Alokasi--Umum (X2), Alokasi--Khusus (X3), Belanja Daerah (X4), dan Pembangunan-Manusia-Indeks (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

**Data Tabulasi dan IPM
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2016(Miliar Rupiah)**

No	Nama Kecamatan	PAD 2016	DAU 2016	DAK 2016	DBH 2016	IPM 2016
1	Kabupaten buru	50,168,085,000	491,122,036,000	496,094,201,000	22,281,402,000	66.63
2	Kabupaten buru selatan	62,891,978,000	415,945,544,000	69,429,630,000	24,102,913,000	62.19
3	Kabupaten kepulauan aru	95,404,552,000	573,200,990,000	42,996,938,000	15,805,463,000	61.32
4	Kabupaten kepulauan tanimbar	61,715,476,000	563,464,570,000	468,983,471,000	20,717,858,000	61.12
5	Kabupaten maluku barat daya	78,122,974,000	554,470,538,000	16,096,009,000	15,508,444,000	59.43
6	Kabupaten maluku tengah	126,042,005,000	977,608,288,000	451,011,755,000	23,018,900,000	69.54
7	Kabupaten maluku tenggara	72,930,039,000	487,843,514,000	498,286,392,000	14,200,603,000	64.2
8	Kabupaten seram bagian barat	102,380,472,000	598,303,239,000	37,108,541,000	15,319,150,000	61.12
9	Kabupaten seram bagian timur	78,706,400,000	509,430,093,000	75,085,912,000	42,804,452,000	61.15
10	Kota ambon	17,545,715,000	686,184,418,000	227,415,067,000	32,635,093,000	79.55
11	Kota tual	15,570,594,000	383,259,624,000	49,375,239,000	9,839,939,000	65.64

**Data Tabulasi dan IPM
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2017 (Miliar Rupiah)**

No	Nama Kecamatan	PAD 2017	DAU 2017	DAK 2017	DBH 2017	IPM 2017
1	Kabupaten buru	670,420,000,000	488,890,000,000	150,470,000,000	23,550,000,000	67.61
2	Kabupaten buru selatan	572,980,000,000	413,830,000,000	132,080,000,000	27,060,000,000	62.75
3	Kabupaten kepulauan aru	805,021,000,000	568,750,000,000	219,680,000,000	16,820,000,000	62.13
4	Kabupaten kepulauan tanimbar	803,200,000,000	553,890,000,000	181,290,000,000	25,010,000,000	61.64
5	Kabupaten maluku barat daya	847,980,000,000	550,740,000,000	231,820,000,000	20,940,000,000	60.16
6	Kabupaten maluku tengah	1,331,070,000,000	960,430,000,000	337,190,000,000	25,950,000,000	70.09
7	Kabupaten maluku tenggara	751,760,000,000	479,520,000,000	205,320,000,000	15,250,000,000	64.94
8	Kabupaten seram bagian barat	838,220,000,000	589,770,000,000	232,630,000,000	15,820,000,000	64.34
9	Kabupaten seram bagian timur	826,250,000,000	506,920,000,000	226,110,000,000	46,560,000,000	62.06
10	Kota ambon	96,310,000,000	674,130,000,000	145,630,000,000	34,140,000,000	79.82
11	Kota tual	560,030,000,000	380,410,000,000	124,730,000,000	10,590,000,000	66.25

**Data Tabulasi dan IPM
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2018(Miliar Rupiah)**

No	Nama Kecamatan	PAD 2018	DAU 2018	DAK 2018	DBH 2018	IPM 2018
1	Kabupaten buru	759,160,000,000	500,120,000,000	222,080,000,000	10,700,000,000	68.25
2	Kabupaten buru selatan	653,590,000,000	421,390,000,000	222,630,000,000	9,570,000,000	63.62
3	Kabupaten kepulauan aru	837,140,000,000	580,690,000,000	245,640,000,000	10,810,000,000	63.12
4	Kabupaten kepulauan tanimbar	713,910,000,000	561,840,000,000	140,560,000,000	11,510,000,000	62.39
5	Kabupaten maluku barat daya	675,650,000,000	566,040,000,000	96,770,000,000	12,840,000,000	60.16
6	Kabupaten maluku tengah	1,328,370,000,000	965,390,000,000	319,220,000,000	17,500,000,000	70.06
7	Kabupaten maluku tenggara	720,260,000,000	495,980,000,000	176,820,000,000	9,730,000,000	65.53
8	Kabupaten seram bagian barat	889,640,000,000	597,530,000,000	101,040,000,000	11,070,000,000	65.14
9	Kabupaten seram bagian timur	729,380,000,000	530,650,000,000	168,880,000,000	29,840,000,000	62.98
10	Kota ambon	870,800,000,000	674,130,000,000	171,770,000,000	24,890,000,000	80.24
11	Kota tual	524,120,000,000	34,710,000,000	121,820,000,000	7,590,000,000	67.21

**Data Tabulasi dan IPM
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2019(Miliar Rupiah)**

No	Nama Kecamatan	PAD 2019	DAU 2019	DAK 2019	DBH 2019	IPM 2019
1	Kabupaten buru	803,170,000,000	529,490,000,000	248,250,000,000	11,110,000,000	68.91
2	Kabupaten buru selatan	592,910,000,000	442,710,000,000	139,920,000,000	10,280,000,000	64.42
3	Kabupaten kepulauan aru	771,030,000,000	602,500,000,000	158,190,000,000	10,340,000,000	63.64
4	Kabupaten kepulauan tanimbar	779,330,000,000	581,140,000,000	186,600,000,000	11,590,000,000	62.86
5	Kabupaten maluku barat daya	773,270,000,000	566,040,000,000	174,940,000,000	18,990,000,000	61.55
6	Kabupaten maluku tengah	1,448,020,000,000	994,930,000,000	403,850,000,000	16,360,000,000	71.25
7	Kabupaten maluku tenggara	721,130,000,000	507,860,000,000	180,580,000,000	8,480,000,000	65.85
8	Kabupaten seram bagian barat	904,800,000,000	624,110,000,000	268,810,000,000	11,880,000,000	65.49
9	Kabupaten seram bagian timur	790,360,000,000	548,080,000,000	142,870,000,000	29,410,000,000	63.74
10	Kota ambon	895,400,000,000	698,470,000,000	168,210,000,000	17,860,000,000	80.81
11	Kota tual	500,880,000,000	407,240,000,000	33,370,000,000	7,660,000,000	67.74

**Data Tabulasi dan IPM
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2020(Miliar Rupiah)**

No	Nama Kecamatan	PAD 2020	DAU 2020	DAK 2020	DBH 2020	IPM 2020
1	Kabupaten buru	71,800,000,000	481,130,000,000	238,030,000,000	11,690,000,000	68.95
2	Kabupaten buru selatan	516,980,000,000	403,900,000,000	68,010,000,000	15,080,000,000	64.69
3	Kabupaten kepulauan aru	657,990,000,000	557,770,000,000	88,900,000,000	11,340,000,000	63.71
4	Kabupaten kepulauan tanimbar	762,320,000,000	527,490,000,000	191,062,000,000	11,890,000,000	62.86
5	Kabupaten maluku barat daya	97,050,000,000	534,340,000,000	97,600,000,000	25,100,000,000	61.9
6	Kabupaten maluku tengah	1,261,210,000,000	889,450,000,000	348,440,000,000	16,590,000,000	71.25
7	Kabupaten maluku tenggara	686,950,000,000	459,740,000,000	208,330,000,000	10,490,000,000	66.2
8	Kabupaten seram bagian barat	785,170,000,000	565,120,000,000	180,510,000,000	11,640,000,000	65.62
9	Kabupaten seram bagian timur	677,510,000,000	504,380,000,000	139,110,000,000	34,020,000,000	64.12
10	Kota ambon	884,180,000,000	632,330,000,000	186,170,000,000	30,350,000,000	80.81
11	Kota tual	467,230,000,000	369,250,000,000	81,380,000	9,450,000,000	67.96

**Data Tabulasi dan IPM
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2021(Miliar Rupiah)**

No	Nama Kecamatan	PAD 2021	DAU 2021	DAK 2021	DBH 2021	IPM 2021
1	Kabupaten buru	686,990,000,000	476,300,000,000	190,500,000,000	20,200,000,000	69.33
2	Kabupaten buru selatan	581,370,000,000	400,130,000,000	156,910,000,000	24,330,000,000	64.8
3	Kabupaten kepulauan aru	707,440,000,000	554,230,000,000	137,820,000,000	15,390,000,000	63.83
4	Kabupaten kepulauan tanimbar	744,290,000,000	524,620,000,000	201,140,000,000	18,530,000,000	62.97

No	Nama Kecamatan	PAD 2021	DAU 2021	DAK 2021	DBH 2021	IPM 2021
5	Kabupaten maluku barat daya	803,620,000,000	530,920,000,000	57,430,000,000	24,330,000,000	62.37
6	Kabupaten maluku tengah	1,320,050,000,000	877,650,000,000	389,850,000,000	25,540,000,000	71.32
7	Kabupaten maluku tenggara	697,770,000,000	453,060,000,000	192,330,000,000	14,350,000,000	66.33
8	Kabupaten seram bagian barat	821,070,000,000	560,440,000,000	245,010,000,000	15,610,000,000	65.83
9	Kabupaten seram bagian timur	749,620,000,000	500,900,000,000	148,720,000,000	49,000,000,000	64.3
10	Kota ambon	860,270,000,000	621,200,000,000	177,160,000,000	34,990,000,000	81.23
11	Kota tual	632,880,000,000	363,640,000,000	237,020,000,000	13,730,000,000	68.16

Descriptif Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	66	25.28	28.21	26.2365	.48858
DAU	66	26.60	27.97	27.4718	.31631
DAK	66	22.05	26.90	25.3824	.86926
DBH	66	23.66	26.23	24.4750	.47768
IPM	66	61.81	82.01	69.9755	4.59856
Valid N (listwise)	66				

Berdasarkan hasil statistik yang dilakukan pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 66 diperoleh nilai minimum 25.28, nilai maximum 28.21, nilai rata-rata (mean) 26.2365 dan standart deviation 0.48858.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 66 diperoleh nilai minimum 26.60, nilai maximum 27.97, nilai rata-rata (mean) 27.4718 dan standart deviation 0.31631.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 66 diperoleh nilai minimum 22.05, nilai maximum 26.90, nilai rata-rata (mean) 25.3824 dan standart deviation 0.86926.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 66 diperoleh nilai minimum 23.66, nilai maximum 26.23, nilai rata-rata (mean) 24.4750 dan standart deviation 0.47768.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 66 diperoleh nilai minimum 61.81, nilai maximum 82.01, nilai rata-rata (mean) 69.9755 dan standart deviation 4.59856.

Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Regresi Berganda

Hasil regresi linier berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	145.968	22.634		6.449	.000
1 PAD	6.870	.606	.730	11.337	.000
DAU	-9.599	1.009	-.660	-9.517	.000
DAK	-.673	.349	-.127	-1.929	.055
DBH	1.003	.560	.104	1.790	.075

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda yang dilakukan pada tabel dapat dilihat persamaan sebagai berikut

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$IPM = 145.968 + 6.870 PAD + -9.599 DAU + -0.673 DAK + 1.003 DBH + e$$

2. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y	X1	X2	X3	X4
N		104	104	104	104	104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8,6363	-1,7913	1,3453	9,6072	6,7179
	Std. Deviation	,13027	,80151	,10284	,05944	1,12554
Most Extreme Differences	Absolute	,115	,186	,245	,184	,099
	Positive	,076	,119	,245	,184	,079
	Negative	-,115	-,186	-,184	-,129	-,099
Test Statistic		,115	,186	,245	,184	,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,095 ^c	,055 ^c	,200 ^{c,d}	,108 ^c	,200 ^{c,d}

Sumber Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai normalitas yang dapat dilihat dari *Asym. Sig (2-tailed)* dari masing-masing variabel, adapun kesimpulan nilai normalitasnya sebagai berikut

- Variabel IPM (Y) nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,095 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- Variabel PAD (X1) nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,055 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- Variabel DAU (X2) nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- Variabel DAK (X3) nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,108 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- Variabel BDH(X4) nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolineritas

Uji Multikolineritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	145.968	22.634		6.449	.000		
PAD	6.870	.606	.730	11.337	.000	.673	1.486
1 DAU	-9.599	1.009	-.660	-9.517	.000	.579	1.726
DAK	-.673	.349	-.127	-1.929	.055	.642	1.559
DBH	1.003	.560	.104	1.790	.075	.823	1.214

a. Dependent Variable: IPM

Tabel dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terdapat nilai Tolerance sebesar 0,673 dan nilai VIF sebesar 1.486. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) terdapat nilai Tolerance sebesar 0,579 dan nilai VIF 1.726. Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) terdapat nilai Tolerance sebesar 0,642 dan nilai VIF 1.559. Sedangkan Variabel Dana Belanja Daerah (X4) terdapat nilai Tolerance 0,823 dan VIF 1.214. Berdasarkan dari hasil tersebut terdapat tidak terdapat multikolineritas dengan variabel bebas. Hal tersebut karena adanya nilai nilai Tolerance > 0,01 dan VIF < 10.

b. Uji Heteroskedastisitas

**Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.549	12.757		2.787	.007
PAD	-.089	.302	-.039	.296	.768
1 DAU	-.725	.552	-.192	1.315	.193
DAK	-.124	.186	-.099	.665	.508
DBH	-.392	.307	-.155	1.278	.205

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diketahui hasil heteroskedastisitas sebagai berikut:

- 1) Pada variabel PAD diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,768 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- 2) Pada variabel DAU diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,193 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- 3) Pada variabel DAK diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,508 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- 4) variabel DBH diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,205 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

**Uji F (Simultan)
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1935.355	4	483.839	47.158	.000 ^b
Residual	1744.187	170	10.260		
Total	3679.541	174			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa nilai F hitung sebesar 47,158 dengan tingkat signifikansi dari hasil uji F sebesar $0,000 < 0,05$. Maka secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

b. Uji Determinasi R square

**Uji Adjust R square
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.526	.515	3.20311

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 4.18 menunjukkan model summary model diatas didapatkan nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,752. Hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama sebesar 51.5% Sedangkan sisanya sebesar 48.5 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian ini.

c. Uji t (Parsial)

Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	145.968	22.634		6.449	.000
1 PAD	6.870	.606	.730	11.337	.000
DAU	-9.599	1.009	-.660	-9.517	.000
DAK	-.673	.349	-.127	-1.929	.055
DBH	1.003	.560	.104	1.790	.075

Sumber: Data Sekunder diolah 2022

Implikasi Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel PAD (X1) memiliki t hitung sebesar 11,337, dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa variabel PAD (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap IPM (Y). Artinya Semakin Tinggi Pendapatan Asli Daerah Akan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra, dkk.,(2015) Pradnyantari dan Dwirandra(2017) Putra dan Ulupui (2015) Sari dan Supadmi (2016).

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel DAU (X2) memiliki t hitung sebesar -5,917, dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang bahwa H2 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa variabel DAU (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM (Y). Artinya Semakin Tinggi Dana Alokasi Umum Yang Terdiri Apa Saja Sebetkan Maka Akan Menurunkan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap, Riva Ubar (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel DAK (X3) memiliki t hitung sebesar -1,929, dengan nilai signifikan 0,055 > 0,05 menunjukkan bahwa H0 Ditolak, sehingga dapat diketahui bahwa variabel DAK (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y).

Hal penelitian ini didukung dengan penelitian Adiputra (2015) tidak adanya pengaruh DAK terhadap indeks pembangunan manusia mungkin disebabkan karena pembangunan manusia tidak hanya dapat dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) melainkan juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Sementara DAK lebih diperuntukkan kepada peningkatan sarana dan prasarana (fisik).

d. Pengaruh Belanja Berpengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel DBH (X4) memiliki t hitung sebesar 1,790, dengan nilai signifikan 0,075 < 0,05 0,07 > 0,05 menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat diketahui bahwa variabel DBH (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y).

Hal ini disebabkan karena pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil merupakan kewenangan pemerintah daerah. Akan tetapi, di Kepulauan Aru terdapat komponen yang

penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kurang leluasa dalam mengelola penggunaan dana bagi hasil yang menyebabkan pengalokasian dana bagi hasil tidak berdampak secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pemerintah provinsi maluku seharusnya dapat mengalokasikan dana bagi hasil lebih banyak untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil maka tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Adiputra (2015) hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini ditolak, artinya DBH tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hal tersebut mungkin terjadi karena pemerintah daerah di bali lebih memfokuskan alokasi DBH untuk tujuan lain di bidang perekonomiannya dan tidak memfokuskan pada peningkatan indeks sumber daya manusianya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku selama tahun 2016-2021. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Uji t (Parsial) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	145.968	22.634		6.449	.000
1 PAD	6.870	.606	.730	11.337	.000
DAU	-9.599	1.009	-.660	-9.517	.000
DAK	-.673	.349	-.127	-1.929	.055
DBH	1.003	.560	.104	1.790	.075

Sumber: Data Sekunder diolah 2022

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini menggambarkan semakin baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin baik pula.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini menggambarkan semakin besar kemampuan Dana Alokasi Umum (DAU) akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini berarti bila Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berdampak apa-apa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2020-2021. Hal ini menggambarkan bila Dana Bagi Hasil (DBH) belum dimaksimalkan keefektifannya, maka belum mampu memberikan dampak pada meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keterbatasan

Penelitian ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun memiliki keterbatasan yaitu:

- a. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Maluku dan hanya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mencakup semua di Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga hasil penelitian hanya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
- b. Penelitian ini hanya menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan masih banyak faktor yang lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang perlu diteliti.

Saran

Berdasarkan perolehan dari jawaban responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian demi meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta Salemba Empat.
- Adiputra, I Made Pradana, Ni Kadek Desi Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada. 2015. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPa terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
- Alichia Eka Puspitasari (2022) ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2018) PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2022
- Anggarini, Tika dan Sutaryo. 2015. *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Booklet IPM Metode Baru, (Online), (<http://www.bps.go.id>), diakses tanggal 24 Januari 2016).
- Badan Pusat Statistik. 2016. IPM 2010-2014, (Online), (<http://www.bps.go.id>),
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015, (Online), (<http://www.bps.go.id>), diakses tanggal 23 Januari 2016).
- Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2011 23-30. diakses tanggal 23 Januari 2016).

- Gede Ferdi Williantara (2016) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2044-2070
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wertianti Dan Dwiranda. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Universitas Udayana, Bali.

***) Uji Sri Dewi Binto II** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

****) Nur Diana** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

*****) Arista Fauzi Kartika Sari** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang